

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Terbentuknya organisasi-organisasi politik di Indonesia tidak lepas dari hasil pendidikan modern ketika diberlakukan kebijakan politik etis oleh pemerintah kolonial Belanda. Tujuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Belanda tersebut hanya untuk memenuhi tuntutan kebutuhan administrasi dan birokrasi kolonial tingkat rendah, namun telah membangkitkan kesadaran kebangsaan dan cita-cita kemerdekaan melalui gerakan politik.

Politik Etis tersebut nantinya melahirkan organisasi-organisasi dari kaum pergerakan seperti Budi Utomo dan Serikat Islam. Dengan lahirnya organisasi-organisasi tersebut membuat berkembangnya organisasi-organisasi lain yang memiliki tujuan sama namun jalan dan caranya yang berbeda.

Pada tahun 1916 Budi Utomo mengajukan permohonan kepada Gubernur Jendral Van Limburg Stirum supaya dibentuk Milisi Bumiputra dan suatu badan parlemen/Dewan Rakyat di Hindia-Belanda. Mengingat ketika itu sedang terjadi perang Dunia I pada tahun 1914.

Dwidjosewoya dari Budi Utomo berhasil melakukan pendekatan dengan kalangan pimpinan Belanda terkemuka. Keterangan dari Menteri urusan daerah jajahan tentang pembentukan Dewan Rakyat tersebut,

dibicarakan di dalam Parlemen Belanda. Hasil pembicaraan tersebut menyatakan bahwa nantinya akan terbentuk Dewan Rakyat di Hindia-Belanda

Pada bulan Mei 1918 *Volksraad* secara resmi dibentuk dan disahkan oleh pemerintah Belanda (Gubernur Jendral Van Limburg Stirum). Pembentukan *Volksraad* atau Dewan Rakyat dibentuk berdasarkan keputusan *Indische Staatsregeling, wet op de Staatsinrichting van Nederlandsh-Indie (Indische Staatsregeling)* pasal 53 sampai pasal 80 bagian kedua, tanggal 16 Desember 1916. Serta diumumkan dalam *Staatsbad* NO. 114 tahun 1916

Dewan ini awal pembentukannya memiliki kekuasaan sebagai penasehat, bukan pembentuk undang-undang. Namun pada 1925 berdasarkan Undang-undang Tata Pemerintahan Hindia Belanda, *Volkraad* memiliki kekuasaan mengajukan petisi, membahas undang-undang, dan mengesahkannya.

Pembentukan *Volksraad* membuat beberapa organisasi kaum pergerakan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk bergerak melalui jalur kooperatif atau jalur moderat. Pada awalnya partisipasi organisasi Indonesia sangat terbatas. Terdapat 38 anggota yang terdiri dari ketua seorang Belanda, 15 orang Indonesia, yang diantaranya 6 Orang anggota Budi Utomo dan Serikat Islam. Pembentukan *Volksraad* kemudian mengalami perkembangan keanggotaan bumiputra. Pada tahun 1931 waktu diterima prinsip “mayoritas pribumi”, sehingga dari 60 orang

anggota terdapat 30 orang pribumi yang menduduki dewan perwakilan nasional tersebut.

Pembentukan penggabungan partai politik timbul dari inisiatif Ir. Soekarno pada tahun 1927 yang menyampaikan gagasannya yaitu keinginan dari PNI untuk menggalang persatuan diantara organisasi politik yang dibentuk oleh kaum pergerakan. Gagasan PNI tersebut diusulkan dalam kongres PSI (Partai serikat Islam) di Pekalongan yang berlangsung tanggal 28 September - 2 Oktober 1927. Gagasan tersebut nantinya mendapatkan sambutan baik di kongres PSI tersebut.

Atas inisiatif dari PNI dan di dukung oleh PSI maka terbentuklah penggabungan organisasi yang bernama Permusyawaratan Partai Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI). PPPKI sendiri tergabung di dalam beberapa organisasi pergerakan seperti PNI, Partai Serikat Islam, Pasundan, Kaum Betawi. Gabungan ini bertujuan menyebarkan dan mendalamkan rasa persatuan serta menyatukan aksi untuk mencapai cita cita nasional. Pada kenyataannya dalam tubuh PPPKI masih banyak terjadi perbedaan pendapat antara organisasi yang melalui jalan kooperatif dengan organisasi jalan non-kooperatif (C.S.T.Kansil, 1990).

Pemikiran-pemikiran tentang pembentukan suatu pemerintahan yang berdiri sendiri di Hindia-Belanda ditingkatkan melalui jalan moderat, yaitu melalui sidang *Volksraad*. Pada tanggal 15 Juli 1936, Soetardjo Kartohadikusumo, ketua Perhimpunan Pegawai *Bestuur* Bumiputra (PPBB) dan kawan-kawannya di *Volksraad* mengajukan tuntutan yang

kemudian dikenal dengan *Petisi Soetardjo*. Petisi tersebut menyatakan bahwa Indonesia dan pemerintah kolonial Belanda akan mengadakan sidang permusyawaratan untuk menentukan pembentukan suatu pemerintah sendiri melalui batas-batas Pasal 1 Undang-undang kerajaan Belanda (Undang undang tersebut berisikan bahwa wilayah kerjaan Belanda mencakup Belanda, Hindia Belanda, Suriname dan Corcau). Pembentukan pemerintahan tersebut berangsur-ansur dalam waktu 10 tahun yang akan datang(M. Junaedi Al Anshori, 2017).

Berdasarkan keputusan Kerajaan Belanda No. 40 tanggal 16 November 1938, petisi yang diajukan atas nama *Volksraad* ditolak oleh ratu Belanda. Penolakan tersebut dikarenakan Indonesia belum siap untuk memikul tanggung jawab memerintah sendiri. Surat keputusan itu disampaikan pada sidang *Volksraad* tanggal 29 November 1938.

Setelah petisi Soetardjo mengalami kegagalan, Parindra segera mengambil prakarsa untuk menyalurkan persatuan politik menuju pembentukan konsentrasi nasional. Dalam koran yang diterbitkan oleh Poesaka Tjureb yang terbitkan pada tahun 1939 menyatakan bahwa pada beberapa hari antaranya, di Jakarta sedang sibuk membangun suatu badan gabungan partai politik Indonesia, yang bernama *Nationale Coneentratie*. Dalam permusyawaratan diantaranya beberapa partai-politik Indonesia yang di pimpin oleh M.H. Thamrin.

Penggabungan pembentukan konsentrasi nasional yang terdiri dari enam partai politik diantaranya adalah PII (Partai Islam Indonesia), PSII

(Partai Serikat Islam Indonesia), Padoendan, Partai Serikat Minahasa, Gerindo, Parindra dan Perkumpulan Kaum Khatolik Indonesia (PKKI). Persatuan organisasi politik tersebut merupakan kelanjutan dari kegagalan dari program PPPKI.

Pada tanggal 21 Mei 1939 diadakan pertemuan resmi Panitia Persiapan Pembentukan Badan Konsentrasi di gedung Permufakatan di Jakarta. Dalam pertemuan tersebut M.H Thamrin menegaskan bahwa situasi Internasional yang semakin serius membutuhkan pembentukan sebuah badan konsentrasi nasional. Hasil pertemuan tersebut lahir badan konsentasi nasional yang bernama Gabungan Politik Indonesia (GAPI). Dengan dibentuknya GAPI masyarakat Indonesia berharap gabungan organisasi GAPI dapat hidup rukun serta para anggotanya dapat bekerja dengan giat dan tepat, jangan sampai gagal seperti pembentukan organisasi yang lalu. GAPI sendiri merupakan suatu organisasi yang baru lahir, akan tetapi semua golongan percaya dengan dibentuknya GAPI terjadi kemajuan zaman dan kemajuan bangsa, untuk meneguhkan diri dalam suatu ikatan persatuan (P. Ch, 1939).

Perjuangan Gabungan Politik Indonesia ditingkatkan dengan semboyan “Indonesia berparlemen”. Semboyan tersebut perlu dikobarkan dalam hati segenap rakyat Indonesia. Aksi Indonesia Berparlemen perlu digiatkan untuk memperoleh dukungan sepenuhnya dari rakyat. Perjuangan politik menuntut pembentukan parlemen itu telah ditetapkan dalam rapat anggota pada tanggal 4 Juli 1939, satu setengah bulan setelah

berdirinya GAPI.

Pemikiran kaum pergerakan tentang aspirasi mengenai terbentuknya suatu pemerintahan hadir tidak hanya di dalam *Volksraad* namun juga di luar *Volksraad* yaitu dari Muhammad Yamin, Rasjid dan Tadjoe'ddi Noer yang berusaha membentuk badan persatuan. Mereka merasakan bahwa dalam perkembangan politik di lingkungan Dewan Rakyat kurang mengangkat daerah-daerah luar Jawa, maka untuk memperjuangkan kepentingan daerah-daerah tersebut dibentuk badan yang disebut Golongan Nasional Indonesia (GNI) pada Juli 1939 (Muttaqin, Fajriudin, 2015).

Pada tanggal 1 September 1939 terjadinya perang Dunia II. Pecahnya Perang Dunia ini justru memberikan kesempatan kaum pergerakan nasional untuk mendesak pemerintah kolonial untuk menyetujui membentuk parlemen. Perang Dunia II yang dimulai oleh pihak Jerman jelas mengancam kedudukan Belanda. Perang Dunia II tersebut dipandang sebagai saat yang paling tepat kepada pemerintah kolonial untuk mengizinkan pembentukan parlemen di Indonesia. Persetujuan tentang pembentukan parlemen tersebut akan mengeratkan hubungan Belanda dengan Indonesia, menimbulkan semangat kerja sama yang baik antara kaum nasionalis Indonesia dan pemerintahan Belanda. Pada tanggal 19 September 1939 GAPI mengeluarkan manifesto yang berisikan mengadakan hubungan kerjasama antara kaum pergerakan dengan pemerintah kolonial untuk melawan paham fasisme jika

pemerintah kolonial memberikan suatu pemerintahan yang berdiri sendiri dengan sendi-sendi demokratis.

Pada tanggal 16 Oktober 1939 Golongan Nasional Indonesia yang didukung oleh Parpindo (Partai Persatuan Indonesia) melakukan inisiatif sendiri dengan mengirim permohonan mengenai pembentukan parlemen dengan pos udara kepada *Staaten General* di Belanda. Muhammad Yamin yang telah ditinggalkan dalam pembentukan GAPI, mengambil prakarsa secara diam-diam dalam soal permohonan pembentukan parlemen, tanpa berunding terlebih dahulu dengan pihak GAPI. Sikap tersebut menimbulkan kemarahan pihak GAPI. Suatu peristiwa yang sangat memalukan dan yang memang dikendaki oleh pihak pemerintah kolonial. Perselisihan paham dan saling mencaci telah terjadi antara GNI dan GAPI. Hal tersebut membuat perpecahan diantara dua organisasi tersebut. Peristiwa tersebut dijadikan alat pemerintah kolonial untuk melumpuhkan musuhnya, dan menunda pelaksanaan gagasan “Indonesia berparlemen”.

Pada tanggal 17 Desember 1939 perjuangan GAPI dilanjutkan melalui aksi-ramai dengan turun langsung ke jalan menyuarakan aksi “Indonesia Berparlemen” sekaligus mengajak rakyat Indonesia untuk mendukung aksi tersebut. Program aksi ramai tersebut membuat MIAI (Majelis Islam “Ala Indonesia) dan PVPN (Perhimpunan *Vakbonden* Pegawai Negeri) ikut serta di dalam GAPI. Setelah melakukan aksi ramai tersebut GAPI mengadakan rapat dengan membentuk Kongres Rakyat Indonesia (KRI). Kongres Rakyat Indonesia terbentuk di Gedung

Permufakatan Indonesia di Gang Kenari II Jakarta Pusat pada tanggal 23 sampai 25 Desember 1939. Kongres tersebut di hadiri utusan-utusan dari 99 perkumpulan nasional. Tujuan Kongres Rakyat Indonesia yaitu menjaga keselamatan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Langkah pertama kearah tujuan itu ialah: menuntut kepada Pemerintahan Belanda di Den Haag supaya Indonesia diberi hak memerintah sendiri dengan suatu badan perwakilan rakyat yang bernama Parlemen Indonesia (Zuhri, 2001)

Dalam rapat GAPI juga terdapat gagasan agar diajukan tuntutan membuat undang-undang dasar nasional yang sepenuhnya beranggotakan orang Indonesia (Ridwan, Khalik, 2020). Selanjutnya dalam Kongres tersebut diputuskan untuk menyusun program kerja Kongres Rakyat Indonesia yang diserahkan kepada wakil-wakil GAPI, seperti Perhimpunan *Vakbonden* Pegawai Negeri, Persatuan Jurnalis Indonesia dan Istri Indonesia. GAPI akan bertindak sebagai badan pelaksana. Aksi “Indonesia berparlemen” selanjutnya akan dipimpin oleh GAPI. Hasil program kerja KRI kemudian disetujui bersama untuk menetapkan Bahasa Indonesia sebagai Bahasa nasional, bendera merah-putih sebagai bendera nasional, dan lagu Indonesia Raya sebagai lagu nasional (Setiono, 2008). Keputusan kongres rakyat Indonesia pada dasarnya membicarakan gerakan “Indonesia berparlemen” perlu digiatkan seluruh rakyat Indonesia. GAPI ditetapkan sebagai badan eksekutif KRI.

Pertempuran PD II membuat pemerintah Belanda semakin gencar melakukan pengawasan di Hindia-Belanda. Aksi “Indonesia berparlemen”

tidak luput dari pengawasan pemerintah. H. Marcella yang merupakan *procureur guneral* memberikan instruksi rahasia kepada polisi PID untuk mengawasi gerak-gerik Parindra. Instruksi itu tidak hanya terbatas sampai kepada Gerindo saja. Partai-partai politik lainnya seperti PSII berkali-kali mendapat peringatan pedas dari pihak polisi perkaitan denganrapat-rapat yang diselenggarakannya. Penasehat Urusan Dalam Negeri G.F. Pijper mengenai aksi “Indonesia berparlemen” mengemukakan pendapatnya kepada gubernur jendral, bahwa GAPI dalam hal ini tidak perlu diperingatkan, karena para pemimpinnya cukup menyadari kegawatan situasi. Pada tanggal 10 Febuari 1940 Aksi “Indonesia berparlemen ditolak oleh pemerintah tertinggi di Belanda dengan alasan selama Belanda masih memegang tanggung jawab kebijakan politik yang dijalankan di Indonesia,selama itu tidak mungkin diadakan Parlemen Indonesia. Setelah keputusan itu diambil, anggota *Sosiaal Democratische Arbeiders Partij*, Stokvis, mengajukan mosi, yang isinya: Permohonan kepada pemerintah kolonial untuk meninjau batas-batas kemungkinan memberikan wewenang politik kepada Indonesia. Mosi tersebut ditentang oleh Menteri Jajahan Welter. Dalampungutan suara mosi itu mengalami kekalahan. Demikian gagasan “Indonesia Berparlemen” dalam realisasinya mengalami kegagalan ditingkat Parlemen di Belanda. Penolakan “Indonesia Berparlemen” oleh perlemen di Belanda menimbulkan kekecewaan yang sangat besardipihak Indonesia.

Pada tanggal 23 Febuari 1940 GAPI menganjurkan berdirinya

Panitia Parlemen Indonesia untuk meneruskan aksi “Indonesia Berparlemen”. Setelah keputusan tersebut mendapat dukungan dari Pasoendan, Parindra, PSII dan lainnya. Namun kelanjutan aksi tersebut tetap dipandang sebagai ancaman terhadap pihak pemerintah Belanda. Kaum pergerakan Indonesia harus tetap gigih menghadapi sikap Belanda yang keras hati menerima semboyan GAPI tersebut. Penolakan tersebut pada hakikatnya memberikan pelajaran baik untuk kesekian kalinya kepada para pemimpin gerakan nasional, bahwa sebenarnya tidak ada maksud pemerintah Hindia-Belanda untuk memberikan wewenang politik yang lebih luas kepada Indonesia. Semenjak penolakan tersebut hati pergerakan Indonesia telah berpaling dari pihak pemerintah. Hal tersebut dapat dilihat dari sikap kaum pergerakan Indonesia pada tanggal 10 Mei 1940 menerima berita bahwa Belanda diduduki oleh tentara Jerman dan pemerintah Belanda melarikan diri ke London. Terhadap berita tersebut reaksi rakyat Indonesia diam-diam gembira (S. Muljana, 2008).

Peristiwa tersebut membuat gubernur jendral mengumumkan, bahwa Indonesia dalam keadaan perang sehingga partai-partai politik dilarang mengadakan sidang politik. Peraturan pembatasan bersidang dipatuhi sepenuhnya oleh kaum nasionalis. Gubernur Jendral dalam sidang *Volksraad* menyatakan bahwa masyarakat akan mengalami berbagai perubahan sehabis perang. Diskusi mengenai kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan sebaiknya ditunda sampai masa sesudah perang.

Kaum nasionalis khususnya dan rakyat Indonesia umumnya

kecewa terhadap pidato resmi gubernur jendral yang pada hakikatnya pidato tersebut tidak memberikan pandangan baru dalam bidang ketatanegaraan yang dicita-citakan dan yang diharapkan oleh kaum nasionalis. Perubahan situasi di negara Belanda tidak mampu membawa perubahan pada sikap pemerintah jajahan. Kesempatan baik tidak boleh dibiarkan berlalu. Perjuangan diteruskan dengan mendobrak pemerintah jajahan melalui jalan legal, yaitu melalui perdebatan di *Volksraad*. Tiga mosi diajukan, yaitu Mosi Thamrin, Mosi Soetardjo, dan Mosi Wiwoho. Mosi pertama mendapatkan penindaklanjutan oleh pihak kolonial yaitu dengan istilah “*Inlander*” dan menggantinya dengan “*Indonesier*” atau “*Inheems*” tetapi tetap berkeberatan untuk menggantikan “*Nederland-Indie*” menjadi “*Indonesie*”. Mosi kedua mengusulkan untuk meniadakan segala diskriminasi berdasarkan kriteria ras terhadap masyarakat Hindia-Belanda dan membentuk satu kewarganegaraan untuk semua lapisan sosial. Tanggapan pemerintah adalah menunda pemecahan persoalan sampai sesudah perang. Mosi Wiwoho mengungkapkan kembali masalah perluasan struktur ketatanegaraan Hindia-Belanda yang memerlukan pembentukan Dewan Negara, perluasan kekuasaan Dewan Rakyat dan tanggung jawab kepala dapertemen terhadap dewan tersebut.

Pemerintah Hindia-Belanda memberikan jawaban dari ketiga mosi tersebut dengan pembentukan suatu komisi pada tanggal 14 September 1940, komisi tersebut bernama *Commissie-Visman*. Tugasnya adalah meneliti keinginan, cita-cita dan pendapat dari berbagai golongan dan

lapisan kaum pergerakan tentang perkembangan ketatanegaraan serta kedudukan berbagai kelompok di dalam susunan ketatanegaraan tersebut. Komisi Visman tersebut baru dapat menanggapi usulan dari kaum pergerakan tentang perubahan ketatanegaraan tersebut setelah perang berakhir. Hal ini membuat kaum pergerakan menyatakan bahwa segala usaha yang dilakukan oleh pemerintah kolonial terhadap perubahan ketatanegaraan di Indonesia bersifat menunda (Muttaqin, Fajriudin, 2015).

Dalam rangka pengembangan bahasan tentang perubahan ketatanegaraan, pidato melalui radio Ratu Wilhelmina pada tanggal 10 Mei 1941 menyatakan tegasannya bahwa ratu membuka kesempatan seluas- luasnya dalam ketatanegaraan. Namun pidato tersebut tidak dianggap “sungguh-sungguh” dan dipandang sebagai cara untuk menarik perhatian rakyat. Pada akhir pemerintah kolonial Belanda, semua usul pihak Indonesia, baik untuk memberikan status kemerdekaan kepada Indonesia maupun perundingan kerja sama dalam menanggulangi bahaya perang, tetap ditolak dengan cara menjalankan politik “menunda”, yaitu menunggu sampai perang selesai. Mendesaknya front perang kearah selatan antara lain penduduk Hindia-Belanda oleh Jepang, pemerintah mengadakan pengarahannya tenaga rakyat untuk pembelaan Indonesia yaitu dengan pembentukan *indische Militie* (Milisi Hindia) yang dipertegaskan kembali dari merupakan pemikiran dari Budi Utomo pada tahun 1916. Bantuan bumiputra sangat diperlukan untuk menambah kekuatan angkatan perang Hindia-Belanda. Penambahan tenagarakyat yang dilancarkan

melalui aksi milisi Hindia tidak besar yaitu sekitar antara lima sampai enam ribu. Jumlah tersebut pasti bisa dipenuhi oleh pemuda-pemuda di Indonesia. Pertimbangan itulah yang dikemukakan oleh pemerintah kolonial dalam mengajukan rencana milisi Hindia dalam bulan Juni 1941 dalam sidang *Volksraad*.

Pada kesempatan ini dalam waktu yang gawat pemerintah mengajukan rencana milisi Hindia, kaum nasionalis ingin juga menggandengkan rencana pemerintah tersebut dengan keinginan akan perubahan ketatanegaraan. Disebabkan waktu yang sangat mendesak, aksi milisi Hindia itu dianggap sebagai persiapan yang sudah sangat terlambat. Dalam penjelasan pemerintah Hindia-Belanda ditekankan pada kegawatan situasi internasional tanpa mementingkan pertahanan yang dilakukan oleh putra-putra Indonesia sendiri.

Dilain pihak kaum pergerakan sedang sibuk menyusun argumentasi untuk menolak aksi milisi Hindia, jika aksi tersebut tidak dibarengi dengan penerimaan usul perubahan ketatanegaraan. Dalam kongres ketiga Parindra di Surabaya pada tanggal 29-30 Juni 1941 telah diputuskan sikap Parindra terhadap aksi milisi Hindia. Keberatan- keberatan Parindra terhadap aksi milisi Hindia sudah sangat terlambat, peraturan-peraturan pada milisi Hindia berbeda dengan peraturan-peraturan wajib milisi di Belanda yaitu pemuda-pemuda yang diterima dalam misili Hindia dikirim ke luar Indonesia, sedangkan di Indonesia sendiri sangat dibutuhkan, pelaksanaan milisi Hindia tidak dibarengi dengan perubahan

ketatanegaraan kepada rakyat Indonesia. Pada tanggal 11 Juli 1945 rancangan konstitusi Hindia tersebut diterima oleh sidang melalui pengutan suara.

Kemenangan pembentukan milisi Hindia tersebut sebenarnya merupakan bencana terhadap Hindia-Belanda, dikarenakan kemenangan tersebut dapat membawa keruntuhan Hindia-Belanda. Semua gerakan nasional menjauhkan diri dari pemerintah. Rakyat bersikap acuh tak acuh terhadap pemerintah.

Pada tanggal 13-14 September 1941 di Yogyakarta Kongres Rakyat Indonesia mengadakan rapat besar. Hasil rapat tersebut menyatakan bahwa Kongres Rakyat Indonesia (KRI) pada kegiatannya perlu ditingkatkan pembentukannya yang lebih luas yaitu dengan menggandeng organisasi tidak hanya politik, namun organisasi lainnya seperti agama dan sosial. Keputusan tersebut nantinya merubah Kongres Rakyat Indonesia (KRI) menjadi Majelis Rakyat Indonesia sebagai suatu bentuk Parlemen buatan Indonesia dan sebagai parlemen partikelir/tandingan dari *Volksraad*.

B. Pembatasan dan Rumusan Masalah

Penelitian ini dibatasi secara temporal pada tahun 1939 ketika dibentuknya Gabungan Politik Indonesia (GAPI) sampai pada tahun 1942 ketika pasukan Jepang tiba di Indonesia, yang menandakan penghapusan segala bentuk organisasi politik. Penelitian ini juga dilakukan di Jakarta yang bersumber pada Perpustakaan Nasional di Salemba dan di Merdeka Selatan Jakarta Pusat

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

- A. Apa yang melatarbelakangi pembentukan Gabungan Politik Indonesia pada tahun 1939?
- B. Bagaimana perkembangan Gabungan Politik Indonesia pada tahun 1939-1941?
- C. Bagaimana perjuangan Majelis Rakyat Indonesia dalam melanjutkan program “Indonesia Berparlemen”?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- A. Menjelaskan perjuangan Gabungan politik Indonesia (GAPI) bersama organisasi dan partai politis lainnya untuk menyelenggarakan program “Indonesia Berparlemen”
- B. Menguraikan tentang apa saja pemikiran-pemikiran dan cita-cita kaum pergerakan mengenai konsep “Indonesia Berparlemen” tersebut kepada pemerintah Belanda

Sedangkan kegunaan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran sejarah dan kajian referensi bagi peneliti yang ingin mendalami tentang Gabungan Politik Indonesia maupun tentang konsep “Indonesia Berparlemen”.

D. Metode dan Bahan Sumber

Metode dan bahan sumber metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2013). Cara ilmiah bisa diartikan sebagai kegiatan penelitian yang dilakukan dengan ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris dan sistematis. Rasional adalah kegiatan penelitian yang dilakukan dengan cara yang masuk akal sehingga bisa dijangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan bisa diamati oleh indera manusia. Sedangkan sistematis adalah penelitian menggunakan langkah-langkah tertentu yang berifat logis.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penulisan sejarah dengan model deskriptif naratif. Langkah-langkah yang digunakan dalam metode sejarah adalah pengumpulan sumber (heuristik), kritik sumber (verifikasi), interpretasi (menafsirkan) dan penyajian dalam bentuk tulisan (Kuntowijoyo, 2013).

1. Heuristik

Heuristik merupakan langkah dalam penelitian sejarah yang merupakan suatu proses mencari untuk menemukan sumber-sumber sejarah. Dalam penelitian ini, dengan langkah heuristik dapat dikumpulkan buku-buku sebagai sumber penyusunan penelitian ini, yang dikelompokkan menjadi dua, yaitu : (1) buku-buku pokok seperti buku Sejarah Nasional Indonesia V: Zaman Kebangkitan Nasional dan Masa Hindia Belanda, Buku Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah

pergerakan Nasional dari kolonialisme sampai nasionalisme jilid 2, Buku Kesadaran Nasional dari kolonialisme sampai kemerdekaan dan sumber-sumber buku lainnya. (2.) Selain itu terdapat sumber-sumber penunjang berupa koran/majalah kuno seperti *Pemandangan* *39, *Penabur* dan *Adil* serta beberapa jurnal dan sripsi lain yang mempunyai tema/pembahasan yang sejenis.

2. Kritik Sumber (Verifikasi)

Setelah seorang peneliti sejarah sudah berhasil mengumpulkan jejak-jejak sejarah sebagai sumber cerita sejarah, maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh seorang peneliti sejarah adalah melakukan kegiatan kritik. Kritik adalah kegiatan menilai, menguji atau menyeleksi sumber jejak-jejak (sumber-sumber) yang benar sejarahnya (Widja, 1988). Dalam hal kritik sumber terbagi menjadi dua tahap, yaitu kritik eksteren dan kritik intern. Kritik eksteren bertujuan untuk menilai suatu sumber dengan mempertanyakan apakah sumber itu asli atau tidak. Sedangkan kritik intern dilakukan setelah melakukan kritik eksteren. Pada penelitian ini kritik eksteren peneliti mengambil sumber berupa koran *Pemandangan* tahun 1939 tampak terlihat koran tersebut dibuat dengan kertas yang sudah menguning dan tulisan yang masih menggunakan ejaan lama, sedangkan jika di kritik intern bahwa, terdapat kesamaan antara penulisan yang terdapat pada buku Djoended, Marwati, Poesponegoro, Nugroho Notokusanto. *Sejarah Nasional Indonesia V: Zaman Kebangkitan Nasional dan Masa Hindia Belanda*, dengan beberapa sumber buku lainnya

yang menyangkut tentang peran GAPI.

3. Interpretasi

Langkah ketiga dalam metode sejarah adalah interpretasi atau penafsiran. Interpretasi adalah menetapkan makna yang saling berhubungan antara fakta-fakta yang telah terhimpun. Fakta-fakta sejarah itu perlu dihubungkan dan dikait-kaitkan satu dengan lain sehingga merupakan suatu rangkaian yang masuk akal dan menunjukkan kesesuaian satu dengan yang lainnya. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa interpretasi adalah sebagai aktivitas merangkai dan menghubungkan atau mengkaitkan fakta-fakta seobyektif mungkin, sehingga dapat mengungkapkan peristiwa masa lampau secara aktual, rasional, dan kronologis.

4. Historiografi

Pada tahap terakhir ini, setelah penulis melakukan proses pengumpulan sumber, verifikasi dan menganalisis sumber-sumber yang diperoleh, maka langkah selanjutnya adalah peneliti mengungkapkannya dalam bentuk tulisan yang sistematis, logis, dan jelas. Peneliti menuliskannya dengan pemahaman dan kata-kata sendiri. Penyajian penelitian dalam bentuk tulisan mempunyai tiga bagian: (1) Pengantar, (2) Hasil Penelitian, dan (3) Simpulan.